



Analisis Upaya Pemerintah Desa dalam Penanganan Masalah Stunting di Desa Pagomogo Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo

Maria Rosandi Dua Ani^{1*}, Jacob Wadu², Belandina L. Long³, Rafi A. Kholikin⁴

¹⁻⁴Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: mariarosandiduaani8@gmail.com^{1*}, jacob.wadu@staf.undana.ac.id², belalong.bl@gmail.com³, rafi_kholikin@staf.undana.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: mariarosandiduaani8@gmail.com

Abstract. *The problem of stunting is still a serious issue in health development in Indonesia because it has an impact on the quality of human resources. This study aims to analyze the efforts of the Pagomogo Village Government in handling stunting. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants were determined using purposive sampling consisting of village governments, health workers, cadres, and the community. The results of the study show that the village government has implemented various programs, such as Supplementary Feeding (PMT), strengthening Human Development Cadres (KPM), improving services through community institutions, and sanitation development. However, the implementation of the program has not been optimal because it is still constrained by economic factors, low public awareness, limited counseling, and access to clean water. This study concludes that the main problem does not lie in the availability of programs, but in the implementation and sustainability aspects. Therefore, it is necessary to strengthen community empowerment, improve education, and evaluate results-based programs.*

Keywords: *Community Empowerment; Public Health; Social Welfare; Stunting; Village Government.*

Abstrak. Masalah stunting masih menjadi isu serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia karena berdampak signifikan pada kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi pertumbuhan fisik maupun kemampuan kognitif serta produktivitas jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa Pagomogo dalam menangani stunting secara komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), peningkatan layanan melalui lembaga kemasyarakatan, dan pembangunan sanitasi. Namun, pelaksanaan program belum optimal karena terbatas oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan penyuluhan, dan akses terhadap air bersih. Kesimpulannya, permasalahan utama bukan pada ketersediaan program, melainkan pada aspek implementasi dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan edukasi, serta evaluasi program berbasis hasil agar efektivitas penanganan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan dan merata.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial, Stunting, Pemerintahan Desa.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan gizi masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu isu utama adalah tingginya prevalensi stunting pada balita, yaitu kondisi kekurangan gizi kronis akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dalam jangka panjang sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan linear anak. Kondisi ini tidak hanya ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kerentanan terhadap

penyakit, gangguan perkembangan kognitif, serta penurunan produktivitas di masa depan (Dewi et al., 2022). Secara global, World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa prevalensi stunting mencapai 22% atau sekitar 149,2 juta anak pada tahun 2020. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus stunting tertinggi setelah Timor Leste, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan karena masih terdapat ketimpangan antarwilayah serta dinamika indikator gizi lainnya.

Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023–2024 menunjukkan adanya perubahan prevalensi masalah gizi anak. Prevalensi stunting menurun dari 21,5% menjadi 19,8%, dan wasting dari 8,5% menjadi 7,4%. Namun, prevalensi underweight justru mengalami peningkatan dari 15,9% menjadi 16,8%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perbaikan status gizi belum merata dan masih memerlukan intervensi yang lebih komprehensif serta berkelanjutan. Dampak stunting bersifat multidimensional dan jangka panjang. Selain memengaruhi pertumbuhan fisik, stunting juga berkaitan erat dengan penurunan kapasitas intelektual, rendahnya prestasi akademik, serta gangguan psikososial anak (Diaz et al., 2015). Lebih lanjut, kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, menurunkan produktivitas kerja di usia dewasa, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi periode krusial dalam pencegahan stunting karena pada fase ini pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung sangat pesat (Yuwanti et al., 2021). Dampak jangka panjang tersebut bahkan dapat berlanjut hingga generasi berikutnya (UNICEF & WHO, 2020).

Secara regional, permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan disparitas yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Papua Tengah (39,2%) dan Nusa Tenggara Timur (37,9%). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara historis juga tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu sebesar 42,6% berdasarkan RISKESDAS 2018, meskipun mengalami penurunan dari survei sebelumnya (Suratri et al., 2023). Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan ibu, kondisi sosial ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi.

Pada tingkat lokal, Kabupaten Nagekeo merupakan salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di Provinsi NTT. Kabupaten ini memiliki karakteristik wilayah dengan tantangan geografis dan sosial ekonomi yang cukup kompleks. Di Kecamatan Nangaroro, data Puskesmas menunjukkan bahwa prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan dari 27,44% pada tahun 2020 menjadi 11,58% pada tahun 2024. Meskipun demikian, fluktuasi

masih terjadi di beberapa desa, seperti Ulupulu 1 dan Pagomogo, yang menunjukkan peningkatan kembali setelah sempat mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program penanganan stunting belum sepenuhnya berkelanjutan dan masih memerlukan penguatan intervensi.

Penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan multisektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Peran ini mencakup pengelolaan program kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan lokal (Pradana, 2021).

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Desa Pagomogo telah menginisiasi berbagai program intervensi, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) melalui posyandu, penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM), edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Selain itu, pelaksanaan rembuk stunting tingkat desa menjadi forum strategis dalam perencanaan dan evaluasi program secara partisipatif (Suhroh et al., 2021).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas peran pemerintah desa dalam menurunkan prevalensi stunting masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran pemerintah Desa Pagomogo dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan dan praktik penanggulangan stunting berbasis desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk membantu individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, konsep ini memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial sehingga masyarakat dapat hidup

layak. Selain itu, UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan (Suharto, 2002; Swasono, 2004).

Menurut Suharto (2004), kesejahteraan sosial dapat dipahami dalam tiga aspek, yaitu: 1)Kondisi: terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, 2)Institusi: adanya lembaga pelayanan sosial, 3)Aktivitas: upaya terorganisasi untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial (Suharto, 1997). Dalam konteks ini, penanganan stunting merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti ibu dan anak.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki tugas utama dalam: 1)Penyelenggaraan pemerintahan, 2)Pelaksanaan pembangunan, 3)Pembinaan kemasyarakatan, 4)Pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan, keuangan desa, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga bekerja sama dengan lembaga masyarakat seperti BPD, Posyandu, dan kader kesehatan. Dengan peran tersebut, pemerintah desa menjadi aktor utama dalam menangani masalah sosial, termasuk stunting, karena paling dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan lokal.

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak.

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa anak dikategorikan stunting jika memiliki nilai *z-score* di bawah -2 standar deviasi. Kasus stunting paling banyak terjadi pada anak usia 24–35 bulan. Penyebab stunting meliputi: 1)Kurangnya asupan gizi, 2)Pola asuh yang kurang tepat, 3)Sanitasi lingkungan yang buruk, 4)Keterbatasan akses layanan kesehatan.

Dampak stunting sangat luas, antara lain: 1)Penurunan kemampuan kognitif (nirmalasari, 2020), 2)Risiko penyakit di masa depan (Jupri et al., 2022), 3)Penurunan produktivitas dan kualitas sdm (Supriasa et al., 2019). Oleh karena itu, stunting menjadi indikator penting dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan Stunting

Penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu: 1) Intervensi Gizi Spesifik. Menyasar penyebab langsung, seperti: a) Pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, b) Pemberian asi eksklusif dan mp-asi, c) Imunisasi dan pengobatan penyakit, d) Intervensi Gizi Sensitif. Menyasar penyebab tidak langsung, seperti: a) Penyediaan air bersih dan sanitasi, b) Edukasi gizi, c) Peningkatan kondisi sosial ekonomi. Di tingkat desa, program penanganan stunting dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), seperti: a) pembangunan sanitasi dan air bersih, b) pelatihan kader kesehatan, c) pemberian insentif kader. Keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam upaya pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alami dan komprehensif tanpa melakukan generalisasi yang luas (Sugiyono, 2009), serta memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena sosial berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Moleong, 2009). Penelitian dilaksanakan di Desa Pagomogo sebagai lokasi yang memiliki program penanganan stunting berbasis desa.

Fokus penelitian diarahkan pada berbagai upaya pemerintah desa dalam penanganan stunting, meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita, penguatan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM), peningkatan layanan pencegahan stunting melalui kelembagaan masyarakat seperti Posyandu dan PKK, serta pembangunan infrastruktur dasar kesehatan dan sanitasi seperti penyediaan air bersih dan fasilitas MCK. Fokus ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan relevan (Moleong, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, laporan, dan arsip yang relevan (Sugiyono, 2018). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017). Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari Kepala Desa, ahli gizi Puskesmas, bidan desa, kader stunting, calon pengantin, orang tua anak stunting, serta ibu hamil. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam program penanganan stunting.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan terkait pelaksanaan program stunting. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin guna memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel dari informan (Yusuf, 2014; Arikunto, 2016). Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai sumber tertulis seperti laporan, arsip, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2018).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk memastikan validitas dan kepercayaan data (Moleong, 2010). Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi antar informan dan dengan dokumen yang tersedia. Teknik ini digunakan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Desa Pagomogo telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2022 melalui kegiatan posyandu. Program ini terdiri dari PMT penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif serta PMT pemulihan yang ditujukan bagi balita dengan masalah gizi selama ± 90 hari. Jenis makanan yang diberikan telah memenuhi prinsip gizi seimbang, seperti telur, ikan, kacang hijau, susu, sayur, dan buah, yang disusun berdasarkan konsep “Isi Piringku”. Data menunjukkan bahwa dari 82 balita pada tahun 2025, sebanyak 37 anak teridentifikasi stunting. Penentuan sasaran dilakukan melalui pendataan rutin oleh kader dan bidan desa, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat sasaran. Hal ini mencerminkan adanya proses pelayanan sosial yang terencana sesuai dengan teori kesejahteraan sosial (Suharto, 2006). Namun, efektivitas program PMT masih menghadapi kendala, terutama kondisi ekonomi keluarga yang memengaruhi keberlanjutan pola makan anak di rumah. Setelah kegiatan posyandu, asupan gizi anak sering tidak terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program masih dominan pada aspek bantuan sosial dan belum sepenuhnya mencapai aspek pemberdayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Noor (2024) dan Nur Hasrat Illahi (2023) yang menekankan faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat sebagai hambatan utama.

Penguatan Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Desa Pagomogo memiliki 25 Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang tersebar di 5 posyandu. Kader berperan dalam pendataan, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi gizi,

serta pendampingan ibu hamil dan keluarga berisiko stunting. Selain itu, kader mendapatkan pelatihan terkait stunting, pemantauan pertumbuhan, gizi seimbang, serta pencatatan data kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tersebut meningkatkan kapasitas kader dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan. Kader juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat, bidan desa, dan puskesmas, sehingga tercipta sistem pelayanan yang terintegrasi.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, keberadaan KPM mencerminkan aspek pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Budi et al. (2020) yang menekankan pentingnya peran kader dalam meningkatkan efektivitas program kesehatan di tingkat desa.

Peningkatan Layanan Pencegahan Stunting melalui Kelembagaan Masyarakat

Pencegahan stunting di Desa Pagomogo dilakukan melalui kelembagaan masyarakat seperti posyandu, PKK, dan kader kesehatan. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, penyuluhan gizi, pemantauan pertumbuhan balita, serta rujukan ke fasilitas kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui posyandu. Partisipasi masyarakat tergolong baik, terutama dari ibu balita, ibu hamil, dan calon pengantin yang aktif mengikuti kegiatan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting.

Namun, kegiatan penyuluhan masih terbatas, yaitu hanya tiga kali dalam satu tahun, sehingga belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Selain itu, masih ditemukan persepsi keliru bahwa anak pendek disebabkan faktor genetik, bukan stunting. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat belum optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Hasrat Illahi (2023) yang menekankan pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dan Sanitasi

Pemerintah Desa Pagomogo telah melakukan pembangunan infrastruktur kesehatan dan sanitasi berupa 4 bak penampung air, pembangunan broncaptering, serta penyediaan 325 unit MCK. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sebagai upaya pencegahan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, terutama dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, akses air bersih masih menjadi kendala utama, khususnya pada musim kemarau yang menyebabkan penurunan debit air dan distribusi yang tidak merata. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pembangunan ini mencerminkan adanya pelayanan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa. Namun, keterbatasan

air bersih menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya optimal. Faktor lingkungan menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung keberhasilan program penanganan stunting. Secara keseluruhan, upaya pemerintah Desa Pagomogo dalam penanganan stunting telah dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, meliputi pelayanan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dijalankan menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Namun, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan penyuluhan, serta akses air bersih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan frekuensi edukasi, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan agar penanganan stunting dapat berjalan lebih optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Desa Pagomogo dalam penanganan stunting telah dilaksanakan melalui berbagai program seperti PMT, penguatan KPM, kegiatan Posyandu dan PKK, serta pembangunan sanitasi, namun pelaksanaannya belum optimal dalam menurunkan stunting secara berkelanjutan. Program yang dijalankan masih cenderung bersifat rutin dan belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku masyarakat, sehingga dampaknya belum stabil. Kendala utama terletak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas kader, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas sanitasi. Dengan demikian, permasalahan utama bukan pada ketersediaan program, tetapi pada aspek implementasi, koordinasi, dan keberlanjutan program.

Saran

Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dengan lebih menekankan pada hasil dan perubahan perilaku masyarakat melalui evaluasi rutin dan pendekatan edukatif. Kapasitas kader perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu berperan lebih efektif di masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif dan persuasif, serta optimalisasi pemanfaatan sarana sanitasi yang telah tersedia. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data juga penting untuk memastikan program berjalan efektif, dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan penanganan stunting.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Dewi, Y. M., Parulian, T. S., & Indriarini, M. Y. (2022). Implementation-specific nutritional interventions in stunting prevention: Literature review. *NurseLine Journal*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.19184/nlj.v7i1.27702>
- Diaz, G. M., Alandia-Román, C. C., Tonani, R., Contente, M. M. M. G., & Vicente, S. A. F. (2015). Effect of polishing and brushing on removal of cigarette smoke stains from artificial teeth. *International Journal of Odontostomatology*, 9(5), 405–412.
- Ilahi, N. H. (2023). *Peran pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara* (Tesis/Doktoral). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Jupri, A., Rahman, B., & Sari, C. (2022). Stunting dan risiko penyakit degeneratif pada usia dewasa. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 120–130.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pencegahan stunting di Indonesia*. Kemenkes RI.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting pada anak: Penyebab dan faktor risiko stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28.
- Noor, A. (2024). *Peranan pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Kahakan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah* (Tesis/Doktoral). Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2004). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran pemerintah desa Ko'Olan dalam penekanan stunting melalui program Gopo (Gojek Posyandu) sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. *Publika*, 9(1), 93–104. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p93-104>
- Suratri, M. A. L., Putro, G., Rachmat, B., Nurhayati, Ristrini, Pracoyo, N. E., Yulianto, A., Suryatma, A., Samsudin, M., & Raharni. (2023). Risk factors for stunting among children under five years in the Province of East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph20021640>
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2020). *Levels and trends in child malnutrition*. UNICEF.

- Yusuf, A. M. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.
- Yuwanti, Y., Himawati, L., & Susanti, M. M. (2022). Pencegahan stunting pada 1000 HPK. *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 35–39.